

2023



LAPORAN KINERJA

**Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Trenggalek
Tahun 2023**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya semata, dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik. Penyusunan laporan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek ini merupakan upaya pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan berdasarkan RENSTRA 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 - 2026. Melalui laporan ini dapat diketahui mengenai sejauh mana keberhasilan, hambatan dan/atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Trnggalek.

Akhirnya, disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini dan disadari bahwa dokumen LKjIP ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu masukan/saran maupun kritik yang membangun dari berbagai pihak masih sangat kami perlukan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKjIP yang akan datang.

Trenggalek, 27 Pebruari 2024

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Trenggalek



EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197106091992011002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan paradigma baru di era reformasi ini bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu Dinas/Instansi harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu instansi teknis yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistika dan urusan pemerintahan bidang persandian melalui LKjIP melaporkan program kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran yang pelaksanaannya didasarkan pada Renstra dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Secara singkat Laporan ini berisi tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan visi Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)”***.

Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Komunikasi mendukung misi ke-3 dalam RPJMD yaitu ***“Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)”***, yang dijabarkan dalam dokumen Renstra 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan (Renja/RKT) Tahun 2023 dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Dokumen tersebut diuraikan ke dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek melalui 2 (dua) Tujuan, 5 (lima) Sasaran Strategis dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama pada tahun 2023 dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

- a. Pada tujuan rencana strategis Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Bersih, Efektif, Efisien, Produktif dan Profesional, telah ditetapkan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target sebesar 86,88. Namun dalam perkembangan kebijakan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengalami perubahan sehingga capaian

realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah belum dapat diinformasikan.

- b. Capaian tujuan rencana strategis Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kolaboratif Demi Pembangunan Yang Efektif dan Efisien Dalam Menunjang Pelayanan Publik Yang Prima, dengan indikator kinerja Indeks SPBE tahun 2023 terealisasi sebesar **4,2** dengan predikat “**memuaskan**”, sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2023 dari Kementerian PAN RB Republik Indonesia tanggal 26 Januari 2024.

Sedangkan Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika pada sasaran :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien, dengan indikator kinerja :
 - a. Nilai (Kategori Nilai) SAKIP pada realisasi tahun 2023 tercapai nilai A (>80 – 90) dengan kategori “Memuaskan”
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), realisasi tahun 2023 tercapai 89,26 dengan kategori “Baik”
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan target kinerja Menuju Informatif (80-96), pada realisasi kinerja tahun 2023 menunjukkan “Kurang Informatif” (16,03). Capaian ini jauh dari harapan yang ditargetkan dikarenakan nilai total dari SAQ (*Self Assessment Questionnaire*) belum memenuhi syarat dan sarana dan prasarana yang tersedia belum mendukung secara maksimal terhadap pencapaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Persentase OPD yang melaksanakan updating desiminasi informasi program dan kinerja OPD melalui media sosial OPD, dari target kinerja 65% terealisasi 88,41% atau 36 OPD telah melakukan updating desiminasi informasi melalui media sosial yang dikelola OPD.
 - c. Jumlah desiminasi informasi program dan kinerja Pemerintah Daerah, dari target kinerja 720 informasi terealisasi 3.156 informasi. Capaian kinerja tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan informasi program dan kinerja pemerintah daerah melalui kerjasama

- jasa publikasi dengan media lokal dan nasional secara online dan offline dapat dikelola dengan optimal.
- d. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan, dari penetapan target kinerja sebesar 96% terealisasi 92% . Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah sangat responsif terhadap berbagai keluhan masyarakat atas pelayanan publik yang menjadi hak Masyarakat, dengan demikian diharapkan dapat berdampak pada perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah.
 - e. Jumlah kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagai jejaring desiminasi informasi, dari target kinerja 5 kegiatan terealisasi 5 kegiatan, ini meunjukkan bahwa pemerintah daerah memberikan ruang keterlibatan masyarakat utamanya melalui Kelompok Informasi Masyarakat dan Relawan TIK untuk berpartisipasi ikut serta menyampaikan informasi dan terlibat dalam menggerakkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Meningkatnya Kualitas Sistem Pengembangan Aplikasi Informatika dengan indikator Persentase Infrastruktur Digital Yang Memadai dari target kinerja sebesar 80% OPD Tercover Jaringan FO dan Internet, 1 Server dan Storage Sistem Informasi TIK terealisasi 100% OPD tercover jaringan FO dan internet.
 4. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan indikator Persentase Penyediaan Sistem Data Dan Statistik Yang Terintegrasi, dari target kinerja Data Statistik Sektoral dan 5 Jenis Data Sektoral Terintegrasi, terealisasi 100% meliputi 572 dataset yang dikumpulkan oleh OPD selaku produsen data pada aplikasi Satudata.
 5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi, dengan indikator Persentase Layanan Insiden TIK, terealisasi 100%. Realisasi capaian kinerja meliputi fasilitasi sertifikat elektronik berupa Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada 276 Pejabat Perangkat Daerah dan Perangkat Desa, 792 layanan email Senapati/Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam JKS (Jaring

Komunikasi Sandi) dengan Admin Utama di Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk capaian keuangan tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan target Pendapatan Asli Daerah dari biaya siaran iklan radio sebesar 6.500.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 4.000.000 atau 61,54%

Potensi pendapatan dari siaran iklan radio ini tidak memenuhi target dikarenakan semakin menurunnya minat masyarakat untuk mendengarkan radio sehingga berpengaruh terhadap efektifitas publikasi maupun promosi usaha.

Sedangkan capaian realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan pagu anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2023 sebesar Rp. 12.206.585.997,- telah terealisasi sebesar Rp. 11.802.844.968 atau sebesar 96,69%.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika	3
1.4.1 Fungsi	3
1.4.2 Uraian Tugas dan Fungsi	4
1.4.3 Struktur Organisasi	6
1.5 Aspek Strategis	9
1.6 Sistematika Pelaporan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis Perangkat Daerah	12
2.1.1 Visi dan Misi	12
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan	14
2.1.3 Indikator Kinerja Utama	16
2.1.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun Sebelumnya	25
B. Capaian Kinerja Organisasi.....	28
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	29
3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu	40

3.3	Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis	49
3.4	Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	55
3.5	Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	56
3.6	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	63
3.7	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	66
C.	REALISASI ANGGARAN	72
BAB IV	PENUTUP	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Oleh karena itu laporan kinerja instansi harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Selain itu laporan kinerja juga harus memenuhi beberapa ciri laporan antara lain relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan. Perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek sebagai pelaksana urusan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian mempertanggungjawabkan capaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan aturan tersebut pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 3 urusan, 5 Program, 12 kegiatan dan 33 sub kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan pengelolaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang mengampu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian
2. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah
 - a) Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun anggaran 2023.

- b) Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

1.4 Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika

Kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika.

Adapun tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1.4.1 Fungsi

- a. Penyusunan Kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang persandian dan bidang Statistik;
- b. Penyusunan Perencanaan Program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan Bidang Statistik;
- c. Pelaksanaan Kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
- d. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan atas kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
- e. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
- f. Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang Persandian dan

- bidang Statistik;
- g. Pembinaan UPTD;
- h. Pelaksanaan Administrasi Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
- i. Penyusunan Perjanjian Kinerja;
- j. Penetapan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur;
- k. Pelaksanaan Survei Kepuasan masyarakat secara periodik;
- l. Pengelolaan administrasi Umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keputakaan dan kearsipan;
- m. Pemberdayaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional;
- n. Pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2 Uraian Tugas dan Fungsi

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik.
- b. Sekretariat, mempunyai tugas:
 1. Merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman kerja;
 2. Mengoordinasikan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan antar Bidang;
 3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana

- dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
 5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik mempunyai tugas:
1. Menyusun program kerja Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
 2. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 3. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 4. Melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Bidang aplikasi informatika mempunyai tugas:
1. Menyusun program kerja Bidang aplikasi informatika sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
 2. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang aplikasi informatika;
 3. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang aplikasi informatika;

4. Melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang aplikasi informatika;
 5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang aplikasi informatika; dan
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bidang statistik sektoral dan persandian mempunyai tugas:
1. Menyusun program kerja Bidang statistik sektoral dan persandian sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
 2. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang statistik sektoral dan persandian;
 3. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang statistik sektoral dan persandian;
 4. Melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang statistik sektoral dan persandian;
 5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang statistik sektoral dan persandian; dan
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

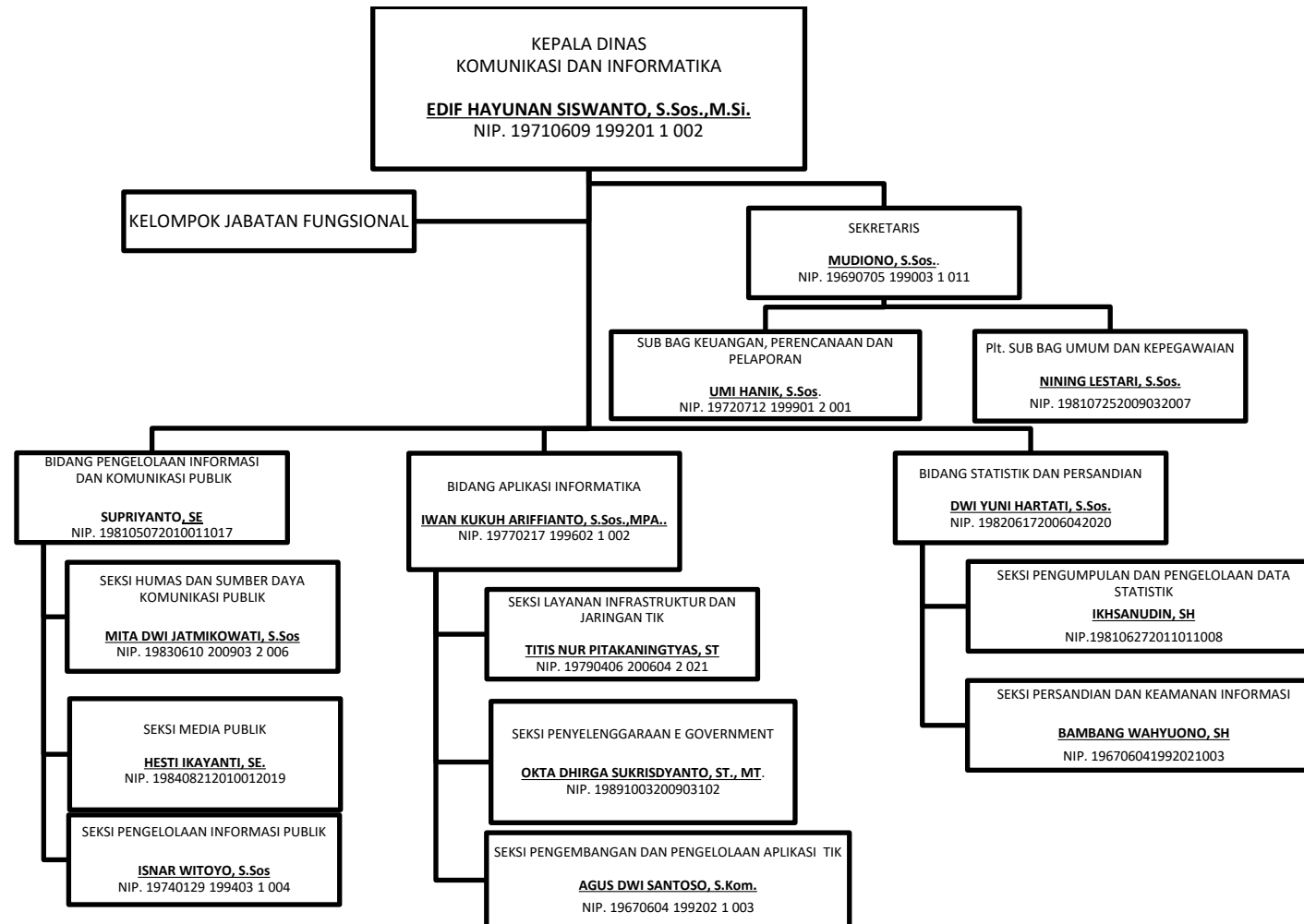
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek dipimpin oleh Kepala Dinas dengan dibantu oleh Sekretaris Dinas dan 3 Kepala Bidang yaitu Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Statistik dan Persandian.

Adapun pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek seluruhnya berjumlah 54 orang terdiri dari 39 orang PNS, 6 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan 10 orang Tenaga Penunjang Kegiatan atau honorer dengan penempatan tugas sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penempatan Unit Kerja

NO.	UNIT KERJA	PNS	PPPK	TPK
1	Kepala Dinas	1	-	-
2	Sekretariat	8	1	2
3	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	7	3	4
4	Bidang Aplikasi Informatika	10	1	1
5	Bidang Statistik dan Persandian	7	1	3
6	Pranata Komputer	4	-	-

Gambar 1
 Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Trenggalek



1.5 Aspek Strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki kewenangan dalam pengelolaan informasi komunikasi, infrastruktur digital, penyediaan data statistik yang handal serta pengawasan dalam keamanan informatika. Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika bahwa beberapa aspek strategis yang ditangani Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu:

1. Aspek penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menunjang urusan rutin pelayanan umum perkantoran dan kepegawaian;
2. Aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan desiminasi informasi program dan kinerja pemerintah daerah baik melalui pengelolaan media komunikasi publik yang dikelola pemerintah daerah dan perangkat daerah, pembuatan konten/pesan kepada masyarakat, pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pelayanan pengaduan masyarakat baik melalui saluran media sosial maupun aplikasi pemerintah SP4N LAPOR. Selain itu guna mendukung kinerja sumber daya pengelolaan informasi dan komunikasi publik telah dilakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagai jejaring desiminasi informasi guna upaya mendukung pemberdayaan masyarakat serta penguatan kapasitas sumber daya penunjang informasi dan komunikasi publik.
3. Aspek aplikasi informatika meliputi pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemda kabupaten/kota serta Pengelolaan e government di lingkup Pemda Kabupaten/Kota.

Pada aspek ini pembangunan infrastruktur TIK berupa jaringan intra pemerintah menjadi kebutuhan guna upaya menjalin konektivitas secara terpadu sistem data dan informasi dengan memanfaatkan jaringan internet yang ditunjang dengan penyediaan aplikasi layanan administrasi pemerintahan dan masyarakat yang dapat memberikan kemudahan dan jangkauan luas.

4. Aspek penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemda Kabupaten/Kota merupakan kebijakan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, mengingat saat ini penyusunan Data telah menjadi kebutuhan guna mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian pemerintahan dan pembangunan.
5. Aspek penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi merupakan salah satu bagian dari tata kelola untuk menjamin perlindungan dan keberlangsungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi, mengingat seiring dengan meningkatnya perkembangan dan ketergantungan terhadap teknologi informasi pada setiap aspek, maka dampak dan konsekuensi kejahatan siber terbaru akan semakin meningkat dari sisi kualitas maupun kuantitas.

1.6 Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 ini tersusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja yang bersangkutan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kinerja yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

2.1.1 Visi dan Misi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Dengan mempertimbangkan kondisi pendukung, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada serta mempertimbangkan budaya lokal, visi Kabupaten Trenggalek yang akan dicapai sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2021-2026 yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)”

Sebagai penjabaran dalam pelaksanaan visi, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menetapkan misi, yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dicapai dalam pembangunan.

Dalam mendukung visi tersebut diatas Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan misi ke-3 sebagaimana dokumen RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, yaitu:

“Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)”

Secara substantif dalam misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan Kabupaten Trenggalek yang kolaboratif, *partnership* dan inklusi antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan masyarakat serta sektor privat sebagai upaya untuk memacu birokrasi pemerintah mewujudkan pelayanan yang bersih dan akuntabel serta dalam memastikan terwujudnya pelayanan prima khususnya pelayanan

administrasi kependudukan, pendidikan dan kesehatan yang berbasis Satu Data besar (*Big Data*). Dalam hubungan antar pemerintah, masyarakat dan sektor privat tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak hanya menekankan pada sisi teknis-teknokratik tapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, sehingga diharapkan kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik dapat meningkat. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan. Saat ini di Kabupaten Trenggalek telah ada Rumah Perempuan yang terus dikembangkan sebagai wadah untuk memberdayakan perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya agar lebih berdaya (*women empowerment*) dan lebih berpartisipasi dalam pembangunan. Melalui pemberdayaan perempuan diharapkan dapat menjaring banyak wirausaha perempuan, sehingga tidak hanya terjadi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045. Tata kelola pemerintahan kolaboratif dan pengarusutamaan gender berbasis pada Big Data yang mengutamakan sinergitas dan konektivitas melalui standarisasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Integrasi dan sharing data antar OPD dapat meningkatkan adanya transparansi data sehingga mendukung terciptanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendorong pembangunan infrastruktur digital sebagai upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur digital dalam era revolusi industri 4.0 yang merupakan transformasi komprehensif di sektor industri dimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya, sehingga diharapkan dengan pembangunan infrastruktur digital yang berwawasan lingkungan akan meningkatkan akses dan keahlian masyarakat dalam teknologi, informasi dan komunikasi. Pembangunan infrastruktur digital akan memberikan dampak pada sektor infrastruktur lain, diantaranya mendorong ekonomi digital, layanan pendidikan dan kesehatan digital, meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana, implementasi teknologi baru dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Untuk mendukung terrealisasinya pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Trenggalek maka Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk memberikan arah terhadap tujuan yang hendak dicapai.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan tertentu dengan target yang telah ditentukan. Dengan demikian tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, yang harus selaras dengan tujuan. Sasaran itu sendiri hendaknya mampu menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan / kegiatan yang bersifat spesifik, rinci dapat diukur (kuantitatif) dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Keterkaitan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek dengan visi dan misi Kabupaten Trenggalek yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 sebagai tabel berikut:

Tabel 2.1
 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek

<p>Visi : Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)</p>
<p>Misi ke-3 (RPJMD) Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis <i>Big Data</i> (Satu Data Besar)“</p>

<p>Tujuan (RPJMD)</p> <p>Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data</p>	<p>Sasaran Pembangunan Daerah (RPJMD)</p> <p>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel bersih dan transparan</p>
---	---

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek menetapkan strategi dan arah kebijakannya sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026, dengan dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih , efektif, efisien, produktif dan profesional	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Diskominfo Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Diskominfo 	<ol style="list-style-type: none"> Penyediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang ditetapkan pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa. Penguatan kapasitas sumber daya aparatur diskominfo
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kolaboratif demi pembangunan yang efektif dan efisien dalam menunjang pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik	Meningkatkan pemberdayaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Pengembangan pengelolaan Informasi dan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan kebijakan teknis, penyediaan informasi, penyebaran informasi dan pelayanan hubungan komunikasi serta pengelolaan pengaduan masyarakat

	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengembangan Aplikasi Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas pengelolaan TIK 2. Membangun/ mengembangkan aplikasi yang terintegrasi 	Mengoptimalkan pengembangan aplikasi dan informatika terintegrasi
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data 2. Meningkatkan kebutuhan data lintas sektoral yang dapat dibagipakaikan tanpa hambatan, dari dan antar Perangkat Daerah 	Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek	Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah

2.1.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau organisasi

pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 dan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama pada perangkat daerah sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Trenggalek ditetapkan sebagaimana tabel 2.1.3:

Tabel 2.3
 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	Target Capaian Tahun 2023	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi dari Inspektorat pada tahun n	69	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (kategori nilai) SAKIP	Nilai (kategori nilai) SAKIP dari Inspektorat pada tahun n	A (81)	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	83	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kolaboratif demi pembangunan yang efektif dan efisien dalam menunjang pelayanan publik yang prima	Indeks SPBE	Nilai indeks	3	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi dan	Indeks keterbukaan informasi publik	Kualifikasi Peningkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik	menuju informatif (80-96)	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

	komunikasi publik	Persentase OPD yang melaksanakan updating desiminasi informasi program dan kinerja OPD melalui media sosial OPD	Jumlah OPD yang melaksanakan updating desiminasi informasi program dan kinerja OPD melalui media sosial OPD/Jumlah OPD	65%	
		Jumlah desiminasi informasi program dan kinerja pemerintah daerah	Jumlah desiminasi informasi program dan kinerja pemerintah daerah melalui media informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	720 informasi	
		Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan	Jumlah OPD yang melaksanakan tindak lanjut penyelesaian pengaduan/ jumlah OPD	96%	
		Jumlah kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagai jejaring desiminasi informasi	Jumlah kemitraan dengan pemangku kepentingan yang dikoordinasikan	5 kegiatan	
5	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengembangan Aplikasi Informatika	Persentase infrastruktur digital yang memadai	tersedia/tidak tersedia	80% OPD tercover jaringan FO dan internet, 1 server dan storage sistem Informasi TIK	Bidang Aplikasi Informatika
6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase penyediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	tersedia/tidak tersedia	Data statistik sektoral dan 5 jenis data sektoral terintegrasi	Bidang Statistik dan Persandian

7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	Persentase layanan insiden TIK	jumlah pengajuan yang terlayani/jumlah pengajuan	100% layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Bidang Statistik dan Persandian
---	---	--------------------------------	--	--	---------------------------------

2.1.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam menyusun Perjanjian Kinerja, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek yang telah ditetapkan dan diintegrasikan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 telah dilakukan revisi berdasarkan hasil koordinasi Bagian Organisasi Setda dengan Kementrian PANRB, bahwa penyusunan perjanjian kinerja tetap mengacu pada PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2024. Sedangkan perjanjian kinerja Tahun 2023 induk mencantumkan tujuan, indikator dan target maka harus dilakukan revisi sesuai aturan. Selanjutnya untuk Perjanjian kinerja induk sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
 Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	a. Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	A (81)
		b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik	a. Indeks keterbukaan informasi publik	menuju informatif (80-96)

		b. Persentase OPD yang melaksanakan updating desiminasi informasi program dan kinerja OPD melalui media sosial OPD	65%
		c. Jumlah desiminasi informasi program dan kinerja pemerintah daerah	720 informasi
		d. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan	96%
		e. Jumlah kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagai jejaring desiminasi informasi	5 kegiatan
3	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengembangan Aplikasi Informatika	Persentase infrastruktur digital yang memadai	80% OPD tercover jaringan FO dan internet, 1 server dan storage sistem Informasi TIK
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase penyediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	Data statistik sektoral dan 5 jenis data sektoral terintegrasi
5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	Persentase layanan insiden TIK	100% layanan Keamanan Informasi dan Persandian

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.706.408.130	APBD Kab. Trenggalek
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2.200.000.000	
3.	Program Aplikasi Informatika	3.101.512.727	
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	195.000.000	
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	93.162.000	
JUMLAH		11.296.082.857	

Dari tabel diatas dapat dilihat anggaran yang tercantum pada Perjanjian Kinerja 2023 sebesar **Rp. 11.296.082.857 (Sebelas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)**. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun seiring berjalannya waktu terdapat kekurangan dan kelebihan dalam alokasi pendanaan sehingga diperlukan penyesuaian pada perubahan rencana kegiatan anggaran perangkat daerah, sehingga berakibat pada Perubahan Perjanjian Kinerja 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	a. Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	A (81)
		b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik	a. Indeks keterbukaan informasi publik	menuju informatif (80-96)
		b. Persentase OPD yang melaksanakan updating desiminasi informasi program dan kinerja OPD melalui media sosial OPD	65%
		c. Jumlah desiminasi informasi program dan kinerja pemerintah daerah	720 informasi
		d. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan	96%
		e. Jumlah kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagai jejaring desiminasi informasi	5 kegiatan
3	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengembangan Aplikasi Informatika	Persentase infrastruktur digital yang memadai	80% OPD tercover jaringan FO dan internet, 1 server dan

			storage sistem Informasi TIK
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase penyediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	Data statistik sektoral dan 5 jenis data sektoral terintegrasi
5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	Persentase layanan insiden TIK	100% layanan Keamanan Informasi dan Persandian

Dalam perubahan Perjanjian Kinerja 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika didukung anggaran sebesar Rp. **12.206.585.997 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.714.283.004	P-APBD Kab. Trenggalek
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2.952.378.266	
3.	Program Aplikasi Informatika	3.191.762.727	
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	195.000.000	
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	153.162.000	
	JUMLAH	12.206.585.997	

Pada Perjanjian Kinerja 2023 dan perubahan Perjanjian Kinerja 2023 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 910.503.140,- anggaran tersebut digunakan untuk belanja rutin dan teknis Dinas Komunikasi dan Informatika yang meliputi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Penambahan anggaran

lainnya digunakan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan belanja teknis yaitu penyusunan arsitektur SPBE, belanja kerjasama media dalam rangka desiminasi informasi program dan kinerja pemerintah daerah, belanja penyediaan lisensi Web Vulnerability Scanner yang dimanfaatkan untuk keamanan informasi berupa scanning jaringan dan website.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban pemenuhan akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek yang disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Trenggalek.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
 Pengkategorian Capaian Kinerja

NO	KATEGORI/ INTERPRETASI	RATA-RATA % CAPAIAN
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan kinerja instansi ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek menyajikan penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut dengan tetap memperhatikan Perjanjian Kinerja beserta perubahan Tahun 2023 serta Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Trenggalek.

A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika memperoleh nilai sebesar **84,62 (delapan puluh empat koma enam puluh dua)** dengan katagori **A (Baik)**. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

Ringkasan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022
 Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Kriteria	Nilai Maksimal	Nilai	Nilai (%)
A.	Perencanaan Kinerja	30,00	27,32	91,07
1.	Pemenuhan	6,00	6,00	100,00
2.	Kualitas Renstra	9,00	9,00	100,00
3.	Implementasi	15,00	12,32	82,13
B.	Pengukuran Kinerja	30,00	23,94	79,80
1.	Pelaksanaan Pengukuran Kinerja	6,00	6,00	100,00
2.	Kualitas Pengukuran	9,00	8,36	92,89
3.	Implementasi Pengukuran	15,00	9,58	63,87
C.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,86	85,73
1.	Pemenuhan Pelaporan	3,00	3,00	100,00
2.	Penyediaan tnmormasi Kinerja	4,50	4,50	100,00
3.	Pemanfaatan Informasi Kinerja	7,50	5,36	71,47
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,51	82,04
1.	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja	5,00	5,00	100,00
2.	Kualitas Evaluasi	7,50	5,63	75,07
3.	Pemanfaatan Evaluasi	5,00	3,00	60,00
4.	Capaian Kilerja Organisasi	7,50	6,88	91,73
TOTAL		100,00	84,63	84,63

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja, nilai maksimal 30, diperoleh nilai maksimal 27,32 atau 91,07%. Hasil nilai menunjukkan bahwa :
 - a. Pemenuhan dokumen Renstra, Renja anggaran yang mendukung kinerja, perjanjian kinerja telah menyajikan indikator sasaran serta rencana aksi;
 - b. Kualitas Rencana Strategis (Renstra) menyebutkan tujuan serta sasaran yang akan dicapai. Indikator kineja sasaran yang akan dicapai telah disusun dengan target yang naik secara konstan pertahunnya;

- c. Implementasi Perencanaan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan monitoring terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun
2. Pengukuran Kinerja, nilai maksimal 30, diperoleh nilai 23,94 atau 79,80%. Hasil nilai menunjukkan bahwa:
 - a. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada IKU yang telah ditetapkan
 - b. Kualitas pengukuran kinerja yang dilahirkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selalu melibatkan pimpinan,. Pengukuran data kinerja yang dilakukan telah relevan dengan capaian kinerja yang diharapkan serta dilakukan secara berkala;
 - c. Implementasi pengukuran kinerja tersebut dengan berpedoman pada mekanisme yang telah dibuat
3. Pelaporan Kinerja, nilai maksimal 30, diperoleh nilai 12,86 atau 85,71%. Hasil nilai menunjukkan bahwa:
 - a. Pelaporan kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika telah sesuai dengan kriteria yang ada. Pelaporan kinerja dicantumkan dalam laporan kinerja disusun secara berkala dan telah diketahui oleh kepala unit kerja
 - b. Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja telah mengungkap informasi tentang pencapaian kinerja dan diperbandingkan dengan target kinerja tahunan.
 - c. Informasi kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika juga digunakan untuk evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. Sebagian informasi kinerja yang disusun mempengaruhi budaya kinerja organisasi
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, nilai maksimal 25, diperoleh nilai 20,50 atau 82%. Hasil nilai menunjukkan bahwa:
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan evaluasi kinerja internal secara berkala;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan SDM yang dimiliki. Sebagian proses evaluasi dilaksanakan dengan pendalaman terhadap hasil data kinerja. Belum terdapat teknologi informasi yang dikelola oleh unit kerja;

- c. Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemanfaatan hasil evaluasi yang dilakukan secara internal;
- d. Pada tahun 2021 rata-rata capaian kinerja adalah 83,41% sedangkan untuk tahun 2022 rata-rata capaian kinerja adalah 125,28%.

Adapun rekomendasi dari hasil evaluasi implementasi SAKIP tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika agar :

1. Melakukan analisa atas capaian kinerja tahun sebelumnya untuk menetapkan target capaian kinerja tahun mendatang;
2. Mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian (refocussing) organisasi dan anggaran;
3. Melakukan koordinasi internal supaya setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;
4. Lebih optimal dalam memanfaatkan informasi kinerja sehingga berpengaruh terhadap budaya kinerja organisasi;
5. Menyusun sebuah alat bantu sederhana berbasis teknologi yang dapat memudahkan pengumpulan data kinerja dalam lingkup unit kerja.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Dari capaian kinerja tahun 2023 secara ringkas tersaji pada table 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
 Capaian Indikator Utama
 Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI	SUMBER DATA
TUJUAN							
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Efektif, Efisien, Produktif dan Profesional	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	86,88	*	#VALUE!		Hasil reviu Inspektorat
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kolaboratif demi pembangunan yang efektif dan efisien dalam menunjang pelayanan publik yang prima	Indeks SPBE	3	4,2	140%	Sangat Baik	Bidang APTIKA
SASARAN							
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	81	84,62	104%	Baik	hasil reviu Inspektorat
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	89,26	108%	Sangat Baik	Diskominfo
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks keterbukaan informasi publik	80	16,03	20%	Sangat Kurang	Hasil mntoring dan eavlusi Badan Publik

		Persentase OPD yang melaksanakan updating desiminasi informasi program dan kinerja OPD melalui media sosial OPD	65%	88,41%	136%	Sangat Baik	Bidang PIKP
		Jumlah desiminasi informasi program dan kinerja pemerintah daerah	720	2.538	353%	Sangat Baik	
		Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan	96%	92%	96%	Cukup	
		Jumlah kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagai jejaring desiminasi informasi	5	5	100%	Baik	
3	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengembangan Aplikasi Informatika	Persentase infrastruktur digital yang memadai	80%	100%	125%	Sangat Baik	Bidang APTIKA
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase penyediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	100%	100%	100%	Baik	Bidang SANTIK
5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	Persentase layanan insiden TIK	100%	100%	100%	Baik	

Berdasarkan tabel diatas capaian realisasi kinerja tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Bersih, Efektif, Efisien, Produktif dan Profesional, dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dari penetapan target 86,88 realisasi sampai saat ini belum dapat diinformasikan mengingat berdasarkan Surat Edaran Menteri Penadayagunaan Aparatur Neagara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Penyampaian Praktek Baik Reformasi Birokrasi, bahwa evaluasi reformasi birokrasi melalui kegiatan pengisian LHE PMPRB dihentikan sehingga sampai saat ini belum ada pedoman alat ukur untuk menilai pelaksanaan reformasi biokrasi perangkat daerah. Sedangkan untuk mendapatkan gambaran perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan sebagai media pembelajaran maka diharapkan setiap instansi tetap menyampaikan informasi praktik baik berupa inovasi yang berdampak kepada masyarakat dan stakeholders.

Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kolaboratif Demi Pembangunan Yang Efektif Dan Efisien Dalam Menunjang Pelayanan Publik Yang Prima, melalui penetapan indikator kinerja Indeks SPBE dari target 2,5 terealisasi 4,21.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kementerian PAN RB Republik Indonesia tanggal 26 Januari 2024 bahwa hasil penilaian SPBE tahun 2023 untuk Kabupaten Trenggalek dengan nilai **4,21** berpredikat **Memuaskan**. Realisasi capaian melebihi target yang ditetapkan tersebut tidak terlepas melalui upaya antara lain:

- a. Rapat koordinasi dan desk hasil pemantauan indeks SPBE;
- b. Monitoring dan evaluasi program smart city untuk mengetahui progres smart city;
- c. Reviu pelaksana audit SPBE 1 kali dilaksanakan auditor internal;

- d. Reviu perubahan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan SPBE;
- e. Penyusunan SOP Manajemen Perubahan SPBE;
- f. Revisi SOP Pusat Data (server) 1 SOP;
- g. Pengawasan e Government (koordinasi pelaksanaan evaluasi manajemen dan audit SPBE lintas sektoral);
- h. Rakor pengisian form evaluasi smart city)
- i. Rapat persiapan evaluasi smart city dengan BAPPEDALITBANGDA dan pembimbing smart city (KemenPANRB)
- j. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Smart City; dan
- k. Reviu arsitekstur SPBE.

Upaya pencapaian indeks SPBE serta upaya mewujudkan hasil evaluasi *smart city* dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan satu urusan pemerintahan namun merupakan kerja kolaborasi dari semua urusan pemerintahan yang diampu masing masing perangkat daerah.

Tabel 3.3
 Indeks SPBE Tahun 2023
 Kabupaten Trenggalek

Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	4,21
Domain Kebijakan SPBE	4,90
Kebijakan Internal tatakelola SPBE	4,90
Domain Tata Kelola SPBE	3,90
Perencanaan Strategis SPBE	3,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	4,50
Penyelenggaraan SPBE	4,00
Domain Manajemen SPBE	3,82
Penerapan Manajemen SPBE	4,13

Audit TIK	3,00
Domain Layanan SPBE	4,32
Adminstrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,10
Layanan Publik Bernasis Elektronik	4,67

Dari sasaran kinerja sebagaimana terdapat dalam tabel 3.2 dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja :

- a. Nilai (Kategori Nilai) SAKIP, pada tahun 2023 menadaptakan kategori nilai A sehingga dapat memberi gambaran bahwa terdapat perbaikan capaian kinerja dari tahun lalu.
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), adalah penilaian hasil survey dari pengguna layanan terhadap layanan yang diberikan penyelenggara pelayanan berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Tahun 2023 target capaian kinerja sebesar 83, realisasi capaian kinerja 89,41 atau 107,72%. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata pengguna layanan merasa puas atas pelayanan yang diberikan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik, indikator kinerja pada sasaran ini adalah :

- a. Indeks Keterbukaan Informasi Publik, dengan target kinerja menuju informatif (80-96), realisasi kinerja tercapai “kurang informatif” dengan nilai (16,03).

Capaian ini jauh dari harapan yang ditargetkan dikarenakan dari hasil SAQ (*Self Assessment Questionnaire*) belum memenuhi syarat karena kurang dari 80. Jika dari hasil penilaian SAQ memenuhi syarat yakni lebih dari 80, maka dilakukan tahap visitasi dan wawancara serta crosscheck web PPID, namun yang menjadi persoalan adalah kondisi web PPID

pada tahun 2023 tidak dapat diakses karena gangguan akibat serangan hack.

Rendahnya capaian target kinerja Keterbukaan Informasi Publik juga disebabkan kondisi sarana dan prasarana pelayanan informasi yang tersedia belum representative sebagaimana standar pelayanan. Selanjutnya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja telah dilakukan penguatan kolaborasi pelayanan informasi yang meliputi kegiatan sosialisasi katalog lokal khusus calon penyedia media sebanyak 50 media, fasilitasi sengketa informasi Kelurahan Kelutan, fasilitasi pembentukan PPID Desa, Bimbingan Teknis Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa pada Perangkat Desa se Kecamatan Gandusari dan Kampak, Monitoring dan Evaluasi SP4N Lapor pada 43 unit kerja (41 OPD, RSUD dan PDAM).

- b. Persentase OPD yang melaksanakan updating desiminasi informasi program dan kinerja OPD melalui media sosial OPD, dari target kinerja 65% realisasi 88,41% atau sebanyak 36 dari 41 OPD telah melakukan updating desiminasi informasi program dan kinerja perangkat daerah.

Capaian kinerja tersebut menggambarkan bahwa perangkat daerah terbuka atas hasil kerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang program-program pemerintah yang telah atau sedang akan dilakukan.

- c. Jumlah desiminasi informasi program dan kinerja pemerintah daerah, dari target kinerja 720 informasi realisasi 3.156 informasi.

Capaian kinerja tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan informasi program dan kinerja pemerintah daerah melalui kerjasama media masa lokal dan nasional secara online dan offline dapat dikelola dengan optimal. Dukungan terhadap capaian indikator sasaran strategis ini adalah Sub Kegiatan

Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan indikator kinerja Jumlah Update Desiminasi Informasi Melalui Media Massa, dari target kinerja 2050 dokumen realisasi capaian target sebesar 3.156 dokumen. Selain itu dari produktifitas konten/pesan kepada masyarakat tercapai sebanyak 65 dokumen (216,66%) dari target kinerja sebanyak 30 dokumen. Dukungan terhadap capaian indikator sasaran strategis ini terdapat pada Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dengan indikator kinerja jumlah *update* desiminasi informasi melalui penyajian konten di media IKP Pemerintah Daerah. Realisasi capaian antara lain :

1). Konten USAHAKU sebanyak 12 antara lain:

- 1). Sate Legendaris Roso Lego
- 2). Tempe Kripik Khas Trenggalek MIRASA
- 3). Dildil snack kripik pare dan Mbak Sripit Alen-alen Jajanan khas Galek)
- 4). Usaha sale pisang mendunia "Kripik sale pisang barokah
- 5). Cerita produk susu "Ladok"
- 6). Cerita usaha Minyak Atsiri UD. Rahayu Watulimo
- 7). Cerita Usaha "Cookies Family"
- 8). Cerita Usaha Pande Besi "Januri"
- 9). Cerita sukses usaha sablon kaos "Bumdes Buluagung" Karanganyar
- 10). Cerita sukses usaha mebel "Bawa Berkah"
- 11). Cerita usaha Tas Anyam RL Putra
- 12). Cerita Gapoktan Sedono Makmur Desa wonoanti Gandusari

2). Video endorse sebanyak 16 kegiatan :

- 1). gethuk yummy
- 2). kue kering FRESH
- 3). yy cake cookies
- 4). kue semprong
- 5). brownies crispy
- 6). krupuk telur asin
- 7). nastar meykath kitchen
- 8). beras kencur Mbak Rus
- 9). pisang manis rivana
- 10). enting enting rodja
- 11). stik sayur
- 12). jajanan koci ubi
- 13). PO cookies
- 14). puding sedot
- 15). kopi benowo brontoyudho
- 16). Bakso tahu crispy.

3). Live Streaming sebanyak 17 kegiatan :

- 1). Forum konsultasi Publik RKPd tahun 2024
- 2). Serah terima Bantuan CSR PT. Bank Jatim Cabang Trenggalek Tahun 2023
- 3). Lounching Pembayaran PBB melalui agregat
- 4). Pengajian dan Sholawat

- bersama Gus Iqdam ⁵⁾. Tabligh Akbar Gema Sholawat ⁶⁾. Gebyar Ekraf 2023 ⁷⁾. Larung Segoro Kirab Hasil Bumi pantai pelang ⁸⁾. Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih ⁹⁾. Upacara Penurunan Bendera Merah Putih ¹⁰⁾. Festival Jaranan Terbuka Trenggalek 2023-day 1 ¹¹⁾. Festival Jaranan Terbuka Trenggalek 2023-day 2 ¹²⁾. Festival Jaranan Terbuka Trenggalek 2023-day 3 ¹³⁾. Puncak Pesta Rakyat Trenggalek ¹⁴⁾. Upacara penantian dan sumpah janji ¹⁵⁾. Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H ¹⁶⁾. Nglandean Ethnic Carnival ¹⁷⁾. Kirab Pataka Jer Basuki Mawa Beya ¹⁸⁾. Malam Puncak Expo Akhir Tahun 2023
- 4). Live Streaming Berbayar sebanyak 9 kegiatan : ¹⁾. Pengajian dan sholawat bareng Gus Idham ²⁾. Tasyakuran Hari Santri Nasional 2023 ³⁾. Pembukaan Raimuna 2023 ⁴⁾. Peringatan Hari Disabilitas Internasional ⁵⁾. Opening TIF ⁶⁾. Penutupan TIF ⁷⁾. Peringatan Hari Ibu ke 95 dan HUT DWP ke 24 ⁸⁾. FKP Ranwal RPJPD ⁹⁾. Pelantikan Kades Lingkup Pemkab Trenggalek
- 5). Talkshow sebanyak 5 kegiatan ¹⁾. Cegah Kanker Sejak Dini ²⁾. Musrena Keren Tahun 2023 ³⁾. Rembug stunting tahun 2023 ⁴⁾. Talkshow Fotografi Gebyar Ekraf 2023 ⁵⁾. Trenggalek Job Fair 2023.
- d. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan, dari target kinerja 96% terealisasi 92%. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah sangat responsif terhadap berbagai keluhan masyarakat atas pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat, dengan demikian diharapkan dapat berdampak pada perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah. Pada sisi lain saluran pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah dan penyelenggara pelayanan di perangkat daerah merupakan wujud pelayanan peran serta masyarakat serta kesadaran masyarakat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan kinerja pemerintahan dan pembangunan. Dukungan terhadap indikator ini adalah tersedianya saluran

pengaduan melalui aplikasi SP4N LAPOR (**Web LAPOR.go.id**) dan media sosial whatsapp nomor 082233343800. Jumlah pengaduan selama tahun 2023 sebanyak 533 aduan dengan rincian melalui media whatsapp sebanyak 225 aduan (42,21%) dan SP4N LAPOR sebanyak 308 aduan (57,79%). Pengaduan yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 491 aduan (92,12%) dan pengaduan dalam proses penyelesaian sebanyak 42 aduan (7,87%). Selama tahun 2023 keluhan masyarakat yang sering diadukan sebagaimana grafik berikut:



- e. Jumlah kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagai jejaring desiminasi informasi, dari target kinerja 5 kegiatan terealisasi 5 kegiatan. Keberadaan pemangku kepentingan, kelompok informai masyarakat, komunitas, sumber daya TIK sebagai bagian dari media komunikasi pemerintah dengan masyarakat sangat berperan penting sebagai jejaring desiminasi informasi. Di harapkan dari kegiatan kemitraan ini ada keterlibatan masyarakat utamanya melalui pemangku kepentingan, kelompok informasi masyarakat dan relawan sumber daya TIK untuk berpartisipasi menyampaikan informasi dan ikut mendorong dalam

menggerakkan program pemberdayaan bagi Masyarakat diantaranya :

1. Pembentukan dan Penyusunan Relawan TIK;
2. Sosialisasi strategi publikasi produk UMKM Desa, visitasi penguatan KIM desa;
3. Gathering media di Masaran Kecamatan Bendungan;
4. Sosialisasi digital UMKM tentang pemasaran digital
5. Bimbingan Teknis literasi digital Tim KKD
6. Lomba logo dan tema Hari Jadi Trenggalek ke 829;
7. Partisipasi lomba KIM tingkat Provinsi.
8. Sosialisasi penguatan peran dan fungsi KIM sebagai penggerak informasi masyarakat dengan peserta pengasuh pondok pesantren.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Sistem Pengembangan Aplikasi Informatika, dengan indikator Persentase Infrastruktur Digital Yang Memadai, dari target 80% OPD tercover jaringan FO dan internet, 1 server dan storage sistem Informasi TIK terealisasi 100% OPD tercover jaringan FO dan internet.

Tahun 2022 semua Perangkat Daerah telah terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Sedangkan tahun 2023 terdapat kegiatan pengembangan jaringan yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi pengembangan jaringan fiber optic dan pemasangan CCTV kota pada 41 titik yang meliputi 27 OPD dan 9 Gedung Pemerintahan (Smart Center, rumah dinas Wakil Bupati, rumah dinas Bupati, Bhawarasa, LPPL Radio, Balai Benih Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek, Ruang Rapat Setda, Kantor Satpol PP pada lingkup Setda, Pendopo Manggala Praja Nugraha, 3 Puskesmas (Puskesmas Tugu, Puskesmas Rejowinangun dan Puskesmas Trenggalek), sewa jaringan fiber optic metro (13 Kecamatan) dan 19 titik free wifi meliputi ¹⁾ Gerbang Depan Stadion Menak Sopal Kelutan Trenggalek, ²⁾ Pasar Pon Trenggalek, ³⁾ Dilem wilis kec. Bendungan Trenggalek, ⁴⁾ Taman Agro Park Trenggalek, ⁵⁾ Hutan Kota Dobangsan Trenggalek, ⁶⁾ Halaman Kantor Kecamatan

Pogalan, ⁷⁾Taman Kedunglurah Kecamatan Pogalan, ⁸⁾ Alun-alun Panggul Wonocoyo Kecamatan Panggul, ⁹⁾ Lapangan Durenan Kecamatan Durenan, ¹⁰⁾ RTH Desa Karang Kecamatan Karang, ¹¹⁾ Pantai Pasir Putih Watulimo Kecamatan Watulimo, ¹²⁾ Balai Desa Suruh Kecamatan Suruh, ¹³⁾ Pasar Gandusari Kecamatan Gandusari, ¹⁴⁾ Terminal Kampak Bendoagung Kecamatan Kampak, ¹⁵⁾ Anjungan Cerdas Tugu Kecamatan Tugu, ¹⁶⁾ Pantai Blado Kecamatan Munjungan, ¹⁷⁾ Thuk Dali Kecamatan Dongko Kab trenggalek, ¹⁸⁾ Wisata watu kandang Pandean kecamatan dongko kab trenggalek, ¹⁹⁾ Perlindungan Kasrepan Kec Pule Trenggalek. Penyediaan bandwidth 53 titik pada 41 OPD, 9 gedung pemerintahan, 3 Puskesmas dan bandwidth 750 Mbps selama 12 bulan. Pelayanan penyediaan dan penitipan server meliputi LPSE, BKD, Kejaksaan dan Bakeuda).

Manajemen pengembangan server meliputi 7 server fisik dan 58 server virtual (VPS). Fasilitasi Lisensi Cpanel/WHM 337 website/SI dan email Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Fasilitasi zoom meeting dan internet kegiatan out door sebanyak 200 kali. Pengembangan dan pengelolaan SDTIK yaitu workshop Tik Tok Shop untuk UMKM Pelatihan SuperAPP. Penatalaksanaan dan Pengawasan E Government dalam penyelenggaraan Pemda Kab/Kota dilaksanakan pada 40 OPD fasilitasi SPBE dan Smart City, 1 dokumen penyusunan raperbup SPBE, Reviu arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektor, dengan indikator Persentase penyediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi, target 100% (Data statistik sektoral dan 5 jenis data sektoral terintegrasi), capaian realisasi 100%, meliputi 572 dataset yang dikumpulkan oleh OPD pada aplikasi Satudata. Integrasi 5 jenis data statistik sektoral 5 jenis data terintegrasi terdiri dari ¹⁾ Integrasi Data pendidikan dengan Aplikasi Satu Data Jawa Timur. ²⁾ Integrasi Data SDM RSUD dr. Soedomo dengan aplikasi SimRS. ³⁾ Integrasi Data Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan Portal SDI. ⁴⁾ Integrasi Data pada Aplikasi Satu

Data Trenggalek dengan Aplikasi Open Data Jawa Timur. 5).
Integrasi Data Indikator Daerah dan Indikator Kinerja Urusan Pada
Aplikasi Satu Data Trenggalek dengan Aplikasi E-Database SIPD.

Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi, indikator Persentase layanan insiden TIK, target 100% layanan Keamanan Informasi dan Persandian realisasi 100%. Realisasi capaian kinerja meliputi fasilitasi sertifikat elektronik pada 276 pejabat perangkat daerah dan perangkat desa, 792 layanan email senapati/ jaring komunikasi sandi. Pemeintah Kabupaten Trenggalek sudah terhubung dalam JKS (Jaring Komunikasi Sandi) dengan Admin Utama di Dinas Komunikasi dan Informatika. Surat dan Berita Sandi yang diterima oleh Admin Utama, selanjutnya diteruskan kepada OPD di Kabupaten Trenggalek melalui media WA Grup yang beranggotakan Admin dari seluruh OPD. Penanganan insiden TIK sejumlah 5 insiden yaitu :

1. <https://skm.trenggalekkab.go.id/>
2. <https://ppid.trenggalekkab.go.id/>
3. <https://bakesbangpol.trenggalekkab.go.id/>
4. <https://dpmptsp.trenggalekkab.go.id/>
5. <https://inlislite.trenggalekkab.go.id/>

3.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
Tujuan 1								
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Efektif, Efisien, Produktif dan Profesional	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	86,88	86,85	100	86,88	Menunggu regulasi baru	
Tujuan 2								
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kolaboratif demi pembangunan yang efektif dan efisien dalam menunjang pelayanan publik yang prima	Indeks SPBE	2,8	2,55	91	3	4,2	140
Sasaran								
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	80,50	84,62	105	81	84,62	104
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	84,37	103	83	89,26	108

2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks keterbukaan informasi publik	80	79,05	99	80	16,03	20
		Persentase OPD yang melaksanakan updating desiminasi informasi program dan kinerja OPD melalui media sosial OPD	45%	100%	222	65%	88,41%	136
		Jumlah desiminasi informasi program dan kinerja pemerintah daerah	720	2028	282	720	2.538	353
		Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan	94%	91,06%	97	96%	92%	96
		Jumlah kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagai jejaring desiminasi informasi	5	6	120	5	5	100
3	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengembangan Aplikasi Informatika	Persentase infrastruktur digital yang memadai	20%	100%	500	80%	100%	125
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase penyediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	100%	100%	100	100%	100%	100

5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	Persentase layanan insiden TIK	100%	100%	100	100%	100%	100
---	---	--------------------------------	------	------	-----	------	------	-----

Dari tabel perbandingan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Efektif, Efisien, Produktif dan Profesional.

Realisasi tahun 2022, pada indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 86,85 atau 99,96%. Sedangkan realisasi kinerja tahun 2023 belum dapat diinformasikan dikarena belum ada alat ukur yang dapat digunakan untuk penilaian dan masih menunggu regulasi tentang penilaian Reformasi Birokrasi, namun menjalankan praktik baik reformasi birokrasi.

Berdasarkan surat KemenPANRB Nomor : B/01/RB.06/2023 tentang Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Pentampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi.

Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kolaboratif demi Pembangunan yang Efektif dan Efisien dalam Menunjang Pelayanan Publik yang Prima. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2023 oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah tanggal 26 Januari 2024 diperoleh nilai indeks SPBE 4,21 kategori Memuaskan. Realisasi kinerja tahun 2023 mengalami kenaikan 1,62 atau 49% jika dibanding dengan tahun 2022. Menurunnya realisasi kinerja SPBE tahun lalu digunakan sebagai bahan evaluasi tahun selanjutnya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indeks SPBE antara lain:

1. Mendorong segera diterbitkannya Perubahan Peraturan Bupati tentang SPBE dan Peraturan Bupati tentang Satu Data
2. Mendorong percepatan inovasi proses bisnis khususnya pada Bagian Organisasi
3. Melakukan audit TIK

Tabel 3.4
 Perbandingan indeks SPBE Tahun 2022 dan Tahun 2023
 Kabupaten Trenggalek

NO.	NAMA INDEKS	TAHUN	
		2022	2023

1	SPBE	2,55	4,21
2	Domain Kebijakan SPBE	3	4,90
3	Kebijakan Internal tata kelola SPBE	3	4,90
4	Domain Tata Kelola SPBE	1,9	3,90
5	Perencanaan Strategis	2	3,25
6	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	4,50
7	Penyelenggaraan SPBE	1,5	4,00
8	Domain Manajemen SPBE	1,82	3,82
9	Penerapan Manajemen SPBE	1,63	4,13
10	Audi TIK	2,33	3,00
11	Domain Layanan SPBE	3,05	4,32
12	Layanan Adminstrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,3	4,10
13	Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,67	4,67

Sasaran 1 : Perbandingan capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Realisasi capaian kinerja tahun 2022 yaitu cukup informatif (79,05), sedangkan tahun 2023 realisasi kinerja kurang informati (16,05), terjadi penurunan. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Terdapat gangguan pada website Dinas Komunikasi dan Informatika karena kena hack sehingga Self Assesment Questionar (SAQ) melalui aplikasi emonev yang disiapkan oleh Komisi Informasi tidak maksimal.
- b. Pemohon informasi sedikit;
- c. Sarana dan prasarana PPID belum memadai.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik antara lain :

- a. Mengajukan permohonan ruang khusus untuk PPID;
 - b. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PPID;
 - c. Desk admin PPID agar lebih aktif dalam pengelolaan informasi daerah/upload pada website PPID
- 2). Indikator Persentase OPD yang melaksanakan updating desiminasi informasi program dan kinerja OPD melalui media sosial OPD.
- Realisasi kinerja tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 86% jika dibanding tahun 2022. Jika tahun lalu semua Perangkat Daerah melakukan updating desiminasi informasi pada masing-masing website OPD, sedangkan saat ini hanya 36 perangkat daerah yang melakukan updating desiminasi informasi pada website OPD. Hal ini dikarenakan kurang pemahaman petugas pengelola informasi daerah tentang pentingnya desiminasi kinerja pemerintah daerah.
- 3). Jumlah desiminasi informasi program dan kinerja pemerintah daerah
- Perbandingan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 480 advetorial atau 71%. Hal ini disebabkan adanya kerjasama yang baik dengan media cetak maupun elektronik, disamping itu beberapa even baik lokal maupun nasional yang diselenggarakan Kabupaten Trenggalek sehingga berpengaruh pada jumlah peliputan.
- 4). Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan.
- Dalam hal pengelolaan pengaduan Tahun 2022, terdapat 235 aduan. Jumlah pegaduan yang ditindaklanjuti sebanyak 214 aduan atau 91,06%, belum ditidaklanjuti 21 aduan masih dikoordinasikan dengan dinas teknis dan dikembalikan ke pengadu dikarenakan data kurang lengkap.
- Sedangkan tahun 2023 jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 533 aduan, 491 aduan terselesaikan, 42 aduan masih dalam proses penyelesaian yang dikoordinasikan dengan perangkat daerah pengampunya. Jumlah pengaduan yang masuk tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,06% jika dibanding tahun

2022. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat memantau dan peduli terhadap pelaksanaan kinerja pemerintah daerah. Perbandingan jumlah aduan yang masuk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
 Perbandingan Pengaduan Tahun 2022 dan 2023

TAHUN	URAIAN PENGADUAN				
	MASUK	DITINDAKLANJUTI SELESAI	%	PROSES DISELESAIKAN (DIKOORDINASIKAN)	%
2022	235	214	91,06	21	8,94
2023	533	491	92,12	42	7,88

5). Indikator Jumlah kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagai jejaring desiminasi informasi.

Perbandingan realisasi capaian kinerja pada indikator ini tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami penurunan 1 kegiatan atau 20%. Namun capaian tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2023. Berkurangnya kegiatan tersebut karena sebagian anggaran dirasionalisasi.

Sasaran 2 : Perbandingan capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Sistem Pengembangan Aplikasi Informatika, indikator kinerja Persentase infrastruktur digital yang memadai.

Realisasi tahun 2022 dan 2023 tercapai 100%. Realisasi capaian kinerja setiap tahunnya tercapai 100% tidak berarti capaian outputnya sama namun dilakukan pengembangan jaringan untuk meningkatkan kualitas layanan melalui jaringan internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini dilakukan karena dari tahun 2022 semua OPD telah terhubung

jaringan internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Kinerja pada tahun 2023 meliputi antara lain:

- a) Pengembangan jaringan fiber optik dan pemasangan CCTV kota pada 41 titik;
- b) Penyediaan bandwidth pada 51 titik;
- c) Pelayanan penyediaan dan penitipan server sebanyak 4 server;
- d) Manajemen dan pengembangan ruang server pada 7 server fisik dan 58 server virtual (VPs);
- e) Fasilitasi lisensi Cpanel (WHM) sebanyak 337 website pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- f) Fasilitasi zoom meeting dan internet kegiatan outdoor;
- g) Pengelolaan dan pengembangan SDTIK berupa workshop tik tok shop untuk UMKM pelatihan Super APP ;
- h) Penatalaksanaan dan pengawasan E Government pada 41 OPD berupa fasilitasi SPBE dan smart city.

Sasaran 3 : Perbandingan capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral, indikator Persentase penyediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi, target kinerja dan realisasi kinerja masih seperti tahun lalu tercapai 100%.

Tahun 2022 dan 2023 realisasi kinerja berupa 4 dokumen meliputi buku Trenggalek Dalam Angka, buku Produk domestik regional bruto (PDRB) Kab. Trenggalek, Buku Kecamatan Dalam Angka (KDA) dan buku buku selayang pandang.

Buku statistik yang dicetak/dihasilkan disampaikan kepada OPD baik secara online (melalui website dinas kominfo www.kominfo.trenggalekkab.go.id) maupun secara offline (buku didistribusikan). Buku ini merupakan sumber data dan informasi yang akurat, dengan tujuan sebagai pedoman yang digunakan oleh OPD dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Sedangkan pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Walidata juga telah memfasilitasi penyebaran data statistik sektoral yang menjadi

kewenangan OPD melalui website Satu Data Trenggalek www.satudata.trenggalekkab.go.id yang dapat diakses secara umum, baik oleh sektor pemerintah, swasta maupun individu (masyarakat). Disamping itu juga dilakukan integrasi data pada 5 jenis data.

Sasaran 5: Perbandingan capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi, indikator Persentase layanan insiden TIK. Realisasi capaian kinerja 100%.

Tahun 2022 pada penyelenggaraan persandian hanya pada tindakan preventif yaitu melakukan pemantauan, pengawasan dan penanganan terhadap gangguan keamanan informasi dan fasilitasi tanda tangan elektronik sampai pada perangkat daerah dan perangkat desa.

Sedangkan tahun 2023 masih belum berubah kinerja yang dicapai yaitu fasilitasi tanda tangan elektronik, penanganan insiden TIK, layanan e mail senapati/jaringan komunikasi sandi, layanan pentest/assesment mandiri website dibawah subdomain trenggalekkab.go.id.

3.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	TARGET AKHIR Renstra (2026)	TINGKAT KEMAJUAN
Tujuan 1					
	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Efektif, Efisien, Produktif dan Profesional	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	*	72	#VALUE!
Tujuan 2					
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kolaboratif demi pembangunan yang efektif dan efisien dalam menunjang pelayanan publik yang prima	Indeks SPBE	4,2	3,5	120%
Sasaran					
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	80	82	98%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,26	86	104%
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks keterbukaan informasi publik	16,03	97	17%

		Persentase OPD yang melaksanakan updating desiminasi informasi program dan kinerja OPD melalui media sosial OPD	88,41%	100%	88%
		Jumlah desiminasi informasi program dan kinerja pemerintah daerah	2.538	720	353%
		Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan	92%	100%	92%
		Jumlah kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagai jejaring desiminasi informasi	5	5	100%
	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengembangan Aplikasi Informatika	Persentase infrastruktur digital yang memadai	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase penyediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	Persentase layanan insiden TIK	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Efektif, Efisien, Produktif dan Profesional

Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, capaian kinerja sampai dengan akhir Renstra tahun 2026 yaitu 72. Sedangkan realisasi sampai saat ini tahun 2022 (tahun ke-2) Renstra sebesar 86,85, namun realisasi kinerja tahun 2023 belum ada evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan surat KemenPANRB Nomor B/01/RB.06/2023 tentang Perubahan Evaluasi RB Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktek Baik Reformasi Birokrasi, disebutkan bahwa:

1. Menghentikan kegiatan pengisian PMPRB;
2. Mekanisme evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023 akan dilakukan berdasarkan pada peraturan terbaru.

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kolaboratif demi pembangunan yang efektif dan efisien dalam menunjang pelayanan publik yang prima.

Indikator indeks SPBE, capaian sampai akhir Renstra tahun 2026 yaitu sebesar 3,5. Namun sampai dengan tahun 2023 (tahun ke-3) tercapai 4,5. Berdasarkan tabel diatas terdapat tingkat kemajuan pencapaian renstra 120%. Hal ini menggambarkan bahwa Dinas Komunkasi dan Informatika melalui program dan kegiatan setiap tahunnya melakukan perbaikan melalui :

1. Penerapkan sistem layanan berbasis TIK;
2. Pengutan regulasi dan standarisasi tata kelola E Government;
3. Meningkatkan fasiltasi infrastruktur jaringan TIK;
4. Membangun/mengembangkan aplikasi berbasis digital untuk fasilitasi layanan publik; dan
5. Peningkatan kapasitas SDM bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

- a. Indikator Nilai (Kategori Nilai) SAKIP, capaian sampai akhir Renstra tahun 2026 (tahun ke-5) sebesar 3,5. Berdasarkan tabel diatas realisasi sampai dengan tahun 2023 (tahun ke-3) terdapat tingkat kemajuan 98%. Perolehan nilai kategori SAKIP tahun 2023 dengan asumsi nilai sebesar 80 (A), dikarenakan masih dalam proses dilakukan reuiu dari inspektorat. Untuk mewujudkan asumsi tersebut upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:
 1. Melakukan tindaklanjut atas rekomendasi penilaian SAKIP.
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran setiap bulan;
 3. Melakukan sosialisasi terhadap kebijakan baru;
 4. Melakukan bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM.
- b. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), capaian sampai akhir Renstra tahun 2026 (tahun ke-5) sebesar 86. Berdasarkan tabel diatas realisasi sampai dengan tahun 2023 (tahun ke-3) terdapat tingkat kemajuan 104%. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat puas terhadap penyelenggaraan layanan yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik

- a. Indikator Indeks keterbukaan informasi publik, capaian sampai akhir Renstra tahun 2026 (tahun ke-5) sebesar 97. Berdasarkan tabel diatas realisasi sampai dengan tahun 2023 (tahun ke-3) terdapat tingkat kemajuan 17%., capaian ini sangat rendah dikarenakan website Dinas Komunikasi dan Informatika error kena hack sehingga Self Assesment Questionar (SAQ) melalui aplikasi emonev yang disiapkan oleh Komisi Informasi tidak maksimal.
- b. Indikator Persentase OPD yang melaksanakan updating desiminasi informasi program dan kinerja OPD melalui media sosial OPD, capaian sampai akhir Renstra tahun 2026 (tahun ke-5) sebesar 100%. Berdasarkan tabel diatas realisasi sampai dengan tahun 2023 (tahun ke-3) terdapat tingkat kemajuan

88%. Hal ini menggambarkan bahwa Perangkat Daerah sebagian besar aktif untuk update informasi tentang kinerja perangkat daerah yang diampu melalui media sosial.

- c. Indikator Jumlah desiminasi informasi program dan kinerja pemerintah daerah, capaian sampai akhir Renstra tahun 2026 (tahun ke-5) sebanyak 720 informasi. Berdasarkan tabel diatas realisasi sampai dengan tahun 2023 (tahun ke-3) terdapat tingkat kemajuan 353%. Hal ini disebabkan jumlah pada indikator ini sampai akhir renstra tidak diakumulasi sehingga tingkat kemajuan melebihi target.
- d. Indikator persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan, capaian sampai akhir Renstra tahun 2026 (tahun ke-5) sebesar 100%. . Berdasarkan tabel diatas realisasi sampai dengan tahun 2023 (tahun ke-3) terdapat tingkat kemajuan 92%. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritikan dari masyarakat direalisasikan melalui penyelesaian tindak lanjut pengaduan.
- e. Indikator Jumlah kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagai jejaring desiminasi informasi, capaian sampai akhir Renstra tahun 2026 (tahun ke-5) sebesar 100%. Berdasarkan tabel diatas realisasi sampai dengan tahun 2023 (tahun ke-3) terdapat tingkat kemajuan 100%. Hal ini menggambarkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika aktif melakukan pembinaan yang melibatkan kemitraan dengan pemangku dengan kepentingan meliputi pembentukan relawan TIK, visitasi penguatan KIM desa, gathering media, sosialisasi penguatan peran dan fungsi KIM sebagai penggerak informasi masyarakat, mengikutsertakan lomba KIM pada tingkat provinsi.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Sistem Pengembangan Aplikasi Informatika, indikator Persentase infrastruktur digital yang memadai, capaian sampai akhir Renstra tahun 2026 (tahun ke-5) sebesar 100%. Berdasarkan tabel diatas realisasi sampai dengan tahun 2023 (tahun ke-3) terdapat tingkat kemajuan 100%. Dalam hal ini Dinas

Komunikasi dan Informatika berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan dibidang infrastruktur digital.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral, indikator Persentase penyediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi capaian sampai akhir Renstra tahun 2026 (tahun ke-5) sebesar 100%. Berdasarkan tabel diatas realisasi sampai dengan tahun 2023 (tahun ke-3) terdapat tingkat kemajuan 100%. Hal ini karena adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar perangkat daerah maupun instansi vertikal (BPS)

Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi, indikator Persentase layanan insiden TIK capaian sampai akhir Renstra tahun 2026 (tahun ke-5) sebesar 100%. Hal ini dikarenakan adanya monitoring dan evaluasi website perangkat daerah untuk mengetahui keamanan website OPD dan melakukan kerjasama dengan BSSN.

3.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada);

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7

Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2023	STANDAR NASIONAL	DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN
	Tujuan 2					

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kolaboratif demi pembangunan yang efektif dan efisien dalam menunjang pelayanan publik yang prima	Indeks SPBE	4,2	2,79	3,00	151%
--	-------------	-----	------	------	------

Jika dilihat dari tabel diatas realisasi kinerja indeks SPBE Kabupaten Trenggalek 4,2 (memuaskan) jika dibanding rata-rata indeks SPBE Nasional pada tingkat Kabupaten/Kota 2,79 (Baik), sedangkan untuk daerah 3,00 (Baik).

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN /KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
Tujuan 1							
	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Efektif, Efisien, Produktif dan Profesional	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	86,88	*	#VALUE!	Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil reviu Tim RB	Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja setiap bulan, serta melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang dihadapi pada bulan lalu.
Tujuan 2							
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kolaboratif demi pembangunan yang efektif dan efisien dalam menunjang pelayanan publik yang prima	Indeks SPBE	3	4,2	140%	<ul style="list-style-type: none"> - kolaborasi yang baik antar perangkat daerah - pendampingan dari tenaga ahli eksternal 	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong segera diterbitkannya Perubahan Perbup SPBE dan Perbup Satu Data - mendorong percepatan inovasi proses bisnis khususnya pada Bagian Organisasi - melakukan audit TIK - mendorong integrasi antar aplikasi
Sasaran							
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	81	84,62	104%	Belum adanya sinkronisasi antara perencanaan dan pelaporan kinerja	Melaksanakan sinkronisasi antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi internal dan pencapaian sasaran kinerja

		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	89,26	108%	Tersedianya standar pelayanan dan SOP pelayanan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan Diskominfo, mereviu standar pelayanan dan SOP pelayanan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik		Indeks keterbukaan informasi publik	80	16,03	20%	website Dinas Komunikasi dan Informatika error kena hack sehingga Self Assesment Questionar (SAQ) melalui aplikasi emonev yang disiapkan oleh Komisi Informasi tidak maksimal. Pemohon informasi sedikit; Sarana dan prasarana PPID belum memadai.	Melakukan koordinasi lintas sektor, melakukan pembinaan/bimtek kepada pengelola PPID perangkat daerah, mengajukan proposal untuk fasilitasi rehab gedung pada instansi
		Persentase OPD yang melaksanakan updating desiminasi informasi program dan kinerja OPD melalui media sosial OPD	65%	88%	136%	Aktifnya website Pemerintah Daerah, baik dari aspek desain antar muka, kualitas penyajian informasi, dan release secara berkala.	Melaksanakan monev pada perangkat daerah, melaksanakan bimtek kepada pegelola informasi perangkat daerah.
		Jumlah desiminasi informasi program dan kinerja pemerintah daerah	720	2538	353%	Terjalin relasi yang baik dengan mediacetak maupun elektronik	Meningkatkan kerjasama dengan media <i>cetak maupun elektronik</i>
		Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan	96%	92%	96%	Pengaduan yang sudah ditindaklanjuti tidak dilaporkan pada Diskominfo	Monitoring dan evaluasi pengaduan pada masing-masing OPD.

		Jumlah kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagai jejaring desiminasi informasi	5	5	100%	Jaringan kelembagaan KIM untuk diseminasi komunikasi informasi publik telah terbangun	Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan pada KIM, Sosialisasi dan bimtek dengan pemagku kepentingan
	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengembangan Aplikasi Informatika	Persentase infrastruktur digital yang memadai	80%	100%	125%	Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi APTIKA	Penerapan sitem layanan berbasis TIK, meningkatkan inrastruktur jaringan TIK, membangun dan mengembangkan aplikasi berbasis digital untuk memfasilitasi pelayanan publik, meningkatkan kapasitas SDM bidang APTIKA
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase penyediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	100%	100%	100%	Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi bidang statistik, adanya ego sektoral	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Kegiatan Verifikasi Updating Data Statistik Sektoral dan IKD Tahun 2022 serta Sosialisasi Sistem Informasi Satu Data Versi Terbaru kepada Produsen Data (OPD) - Melakukan Verifikasi muatan Trenggalek Dalam Angka (TDA) Tahun 2023 dengan BPS - Melakukan Koordinasi persiapan pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dengan BPS - Sosialisasi Kegiatan EPSS, Narsum dari BPS - Melakukan Bimtek Penyusunan Standar Data dan Metadata Statistik Sektoral, Narsum dari BPS dengan peserta seluruh Produsen Data (OPD) - Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan SIPD (E-walidata dan E-database) dan Geoportal Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

						<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan dan Pengolahan Data untuk Penyusunan Selayang Pandang Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 - Rapat Pemaparan Konsep dan Diskusi Akhir Penyusunan Selayang Pandang Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 - Melaksanakan Diseminasi Data Statistik Sektorial kepada OPD melalui media offline (buku) dan media online (website Dinas Komunikasi dan Informatika) - Melakukan Pembinaan dan Bimtek Prinsip Satu Data Indonesia (Standar Data dan Metadata) dengan seluruh Produsen Data (OPD), Narsum dari BPS - Pembuatan Web Service dan Infrastruktur Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai proses dari Integrasi dengan Sistem Informasi/Aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Satu Data Jatim dan juga dengan portal Satu Data Indonesia.
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	Persentase layanan insiden TIK	100%	100%	100%	<p>1). Kurangnya sarana dan prasarana pendukung keamanan informasi. 2). Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dibidang keamanan informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Desk Verifikasi Website OPD guna mengetahui kondisi keamanan website OPD yang ada dibawah subdomain trenggalekkab.go.id - Melaksanakan layanan Keamanan Informasi yang meliputi : Fasilitasi TTE, Monitoring Website OPD, Assessment Mandiri Website OPD dan Layanan Email Sanapati (Email Bersandi) - Melakukan PKS dengan BSSN-RI terkait Pemanfaatan Sertifikat Elektronik (TTE)

						<ul style="list-style-type: none"> - Mengambil langkah-langkah Penanganan Insiden TIK - Melakukan Koordinasi dengan BSSN-RI terkait Penanganan Insiden TIK - Mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM yang diselenggarakan oleh BSSN-RI - Melaksanakan Evaluasi Sistem Keamanan Informasi (Indeks KAMI) dengan BSSN-RI - Melakukan Literasi Keamanan Informasi dengan Narsum dari BSSN-RI - Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)
--	--	--	--	--	--	---

Berdasar tabel diatas terdapat 7 (tujuh) indikator yang realisasi capaian kinerja diatas 100% dan 2 (dua) indikator realisasi capaian dibawah 100%. Sedangkan 2 indikator belum dapat diinformasikan realisasi capaian kinerjanya dikarenakan harus menunggu regulasi terbaru tetapi tetap melaksanakan praktek baik reformasi birokrasi. Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dikarenakan sebagai berikut:

1. Adanya kolaborasi antar perangkat daerah;
2. Adanya pendampingan dengan tenaga ahli;
3. Fasilitasi semua urusan yang menjadi kewenangan Diskominfo
4. Melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelola pada perangkat daerah;
5. Peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis pengelolaan manajemen server, bimtek bijak bermedia, workshop tik tok bagi pelaku UMKM dll.
6. Monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka pengawasan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
7. Melakukan Kegiatan Verifikasi Updating Data Statistik Sektoral.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi website perangkat daerah;

Adapun hal-hal yang menyebabkan kegagalan antara lain:

- Faktor internal, meliputi:
 1. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai yaitu gedung perkantoran yang belum memenuhi standar perkantoran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 67 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintahan Daerah;
 Misal : Belum ada aula/tempat rapat untuk melakukan koordinasi maupun evaluasi kinerja secara berkala
 2. Kurangnya pemahaman terhadap penyusunan perencanaan. Selama ini dalam penyusunan perencanaan masih fokus pada besaran anggaran tidak memperhatikan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai.
 3. Kompetensi ASN perlu ditingkatkan.
- Faktor eksternal, meliputi:
 - a. Masih terdapat ego sektoral pada perangkat daerah;
 - b. Perubahan regulasi (keuangan SIMDA ke FMIS, SIPD ke SIPD RI)

- c. Ekspetasi penilaian semakin tinggi;
- d. Tidak ada proses perbaikan data pendukung.

3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program kegiatan yang dikelola, meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana perkantoran yang kurang memadai. Efektifitas dan efisiensi terhadap anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN	
Tujuan 1									
	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Efektif, Efisien, Produktif dan Profesional	86,88	86,85	100%		12.206.585.997,00	11.802.844.968,00	97%	1
Tujuan 2									
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	3	4,20	140%		538.500.000,00	482.634.554,00	90%	2
Sasaran									
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	81	84,62	104%	106%	5.006.953,00	4.960.000,00	99%	1
		83	89,26	108%		12.206.585.997,00	11.802.844.968,00	97%	1
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik	80	16,03	20%	141%	119.750.000,00	119.750.000,00	100%	1
		65%	88,41%	136%		200.000.000,00	152.659.000,00	76%	2
		720	2.538	353%		2.232.328.266,00	2.155.183.531,00	97%	1
		96%	92%	96%		119.750.000,00	119.750.000,00	100%	1
		5	5	100%		128.500.000,00	126.690.413,00	99%	1

Meningkatnya Kualitas Sistem Pengembangan Aplikasi Informatika	80%	100%	125%		2.653.262.727,00	2.616.860.902,00	99%	1
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	100%	100%		195.000.000,00	177.276.925,00	91%	1
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	100%	100%	100%		153.162.000,00	144.286.433,00	94%	1

Pengukuran efisiensi dan efektifitas capaian kinerja dihitung dengan persentase capaian dari setiap indikator dalam satu tujuan atau satu sasaran dirata-rata. Hasil rata-rata persentase capaian kinerja dibandingkan dengan persentase serapan anggaran, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi. Selanjutnya jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka tidak efisien, jika tingkat efisiensi sama dengan 1, maka impas, sedangkan jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari 1, maka efisien.

Berdasar tabel diatas dapat dijelaskan sebanyak 10 indikator tujuan maupun sasaran memiliki tingkat efisiensi 1 sehingga dinyatakan memiliki efektifitas dalam mencapai realisasi kinerja dan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya anggaran. Namun 2 indikator terdiri dari 1 (satu) indikator tujuan nilai reformasi birokrasi realisasi target menggunakan asumsi dipersamakan dengan tahun lalu. Hal ini dikarenakan penilaian menunggu regulasi terbaru sebagaimana disebutkan dalam surat edaran KemenPANRB Nomor B/01/RB.06/2023 tentang Perubahan Evaluasi RB tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktek Baik RB, demikian juga dengan indikator kategori ilai SAKIP.

Selanjutnya 2 indikator mencapai tingkat efisiensi 2 dengan kriteria sangat efisien yaitu pada tujuan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan realisasi capaian kinerja indeks SPBE 4,2 atau 140% dan sasaran meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan indikator Jumlah desiminasi informasi program dan kinerja pemerintah daerah realisasi capaian target 2.538 atau 353%.

3.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Hasil analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersajikan sebagaimana Tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.10
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
Tujuan 1							
	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Efektif, Efisien, Produktif dan Profesional	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	menunggu regulasi terbaru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	114,99%	MENUNJANG
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	dalam proses		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	48,14%	MENUNJANG
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	108%		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	348,01%	MENUNJANG
Tujuan 2							
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kolaboratif demi pembangunan yang efektif dan efisien	Indeks SPBE	140%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dearah yang disusun	40,74	MENUNJANG

	dalam menunjang pelayanan publik yang prima			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	242.5 %	MENUNJANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	78	MENUNJANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	90 %	MENUNJANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	144	MENUNJANG
Sasaran				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di Pelihara	109	MENUNJANG
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks keterbukaan informasi publik	20%	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	203%	MENUNJANG
		Persentase OPD yang melaksanakan updating desiminasi informasi program dan kinerja OPD melalui media sosial OPD	136%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Update Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	203%	MENUNJANG

		Jumlah desiminasi informasi program dan kinerja pemerintah daerah	353%				
		Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan	96%				
		Jumlah kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagai jejaring desiminasi informasi	100%				
Meningkatnya Kualitas Sistem Pengembangan Aplikasi Informatika	Persentase infrastruktur digital yang memadai	125%	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Diskominfo	169,63%	MENUNJANG	
				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintergrasi	230,64%	MENUNJANG	
				Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	82.5 %	MENUNJANG	

				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	259.99 %	MENUNJANG
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase penyediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	MENUNJANG
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota yang disusun	4,00	MENUNJANG
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	Persentase layanan insiden TIK	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	MENUNJANG
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Kasus Keamanan Informasi dan Persandian yang di susun	91,67	MENUNJANG

Berdasarkan tabel diatas terdapat 5 (lima) program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Merupakan salah satu program yang menunjang pencapaian keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi. Semua kebutuhan yang bersifat rutin disediakan melalui program ini antara lain belanja gaji dan tunjangan PNS, penyediaan ATK, belanja jasa listrik, telp dan air, pemeliharaan gedung dan sarana dan prasarana kantor dll.
- b. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik merupakan salah satu program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dengan publikasi dan komunikasi untuk mendapatkan dukungan *stakeholders*, melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan kelembagaan masyarakat. Disamping itu juga terdapat beberapa kegiatan mendukung tercapainya keberhasilan sosialisasi katalog lokal khusus calon penyedia media 50 media, fasilitasi pembentukan PPID Desa, pengelolaan pengaduan, pembentukan dan penyusunan relawan TIK, sosialisasi digital UMKM, Bimtek literasi digital Tim KKD, Sosialisasi penguatan peran dan fungsi KIM sbg penggerak informasi masyarakat
- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Merupakan salah satu program yang menunjang pencapaian keberhasilan kinerja perangkat daerah. Hal ini didukung melalui fasilitasi penyediaan bandwidth, pengembangan jaringan fiber optic dan pemasangan CCTV kota, pelayanan penyediaan dan penitipan server, manajemen dan pengembangan ruang server, fasilitasi lisensi cpanel/WHM, fasilitasi zoom meeting dan internet kegiatan outdoor, pengembangan dan pengelolaan SDTIK, penatalaksanaan dan pengawasan e *Government*.
- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Merupakan program yang menunjang ketersediaan satu data yang dilakukan melalui koordinasi, pengolahan, desiminasi dan publikasi data kinerja yang digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi pembangunan.
- e. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

merupakan salah satu program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja keamanan persandian melalui desk verifikasi website perangkat daerah guna mengetui kondisi keamabab websie dibawah subdomain trenggalekkab.go.id, melakukan kerjasama dengan BSSN-RI dan melakukan peningkatan kapasitas SDM yang diselenggarakan BSSN-RI, melalukan penilaian indeks KAMI dengan BSSN RI.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat target Pendapatan Asli Daerah sebesar 6.500.000 realisasi 4.000.000 atau 61,54%. Kurang optimalnya pencapaian target PAD dari siaran iklan radio dikarenakan semakin berkurangnya minat masyarakat terhadap siaran radio sehingga berpengaruh terhadap efektifitas siran iklan melalui radio akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta pendapatan dari siaran iklan radio ini masih didasarkan pada sumbangan masyarakat mengingat regulasi daerah yang mengatur besaran biaya siaran iklan radio belum ada sehingga berdampak pada proyeksi pendapatan tidak dapat dipastikan setiap bulannya.

Disamping itu untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2023 sebesar 12.206.585.997 realisasi 11.802.844.968 atau 96,69%. Adapun uraian tersebut sebagai berikut:

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN		%
	TARGET	REALISASI	
Bidang Komunikasi dan Informatika	12.206.585.997,00	11.802.844.968,00	96,69
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.206.585.997,00	11.802.844.968,00	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.206.585.997,00	11.802.844.968,00	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.750.871.638,00	5.062.902.550,00	88,04
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.006.953,00	4.960.000,00	99,06
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.006.953,00	4.960.000,00	99,06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.830.013.897,00	4.717.533.048,00	97,67
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.745.973.897,00	4.646.993.048,00	97,91
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.040.000,00	70.540.000,00	83,94
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.634.084,00	0,00	0,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	0,00	0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33.634.084,00	0,00	0,00

Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.245.694,00	202.680.346,00	94,16
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.869.350,00	97,39
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.529.161,00	29.345.100,00	99,38
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	9.919.800,00	99,20
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.500.000,00	26.392.078,00	99,59
Penyediaan Bahan/Material	46.340.000,00	39.269.822,00	84,74
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.954.550,00	0,00	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.121.983,00	92.084.196,00	97,83
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	800.000,00	800.000,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.623.364,00	29.513.779,00	99,63
Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.623.364,00	29.513.779,00	99,63
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	545.560.151,00	519.984.099,00	95,31
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.198.100,00	105.863.250,00	91,11
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.250.000,00	6.245.927,00	99,93

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	423.112.051,00	407.874.922,00	96,40
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.787.495,00	91.463.127,00	99,65
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.962.500,00	43.901.627,00	99,86
Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.377.161,00	23.142.000,00	98,99
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.447.834,00	24.419.500,00	99,88
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.952.378.266,00	2.816.982.534,00	95,41
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.952.378.266,00	2.816.982.534,00	95,41
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	200.000.000,00	152.659.000,00	76,33
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.232.328.266,00	2.155.183.531,00	96,54
Pelayanan Informasi Publik	119.750.000,00	119.750.000,00	100,00
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	128.500.000,00	126.690.413,00	98,59
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	31.000.000,00	29.515.490,00	95,21
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	240.800.000,00	233.184.100,00	96,84

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.191.762.727,00	3.099.495.456,00	97,11
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.653.262.727,00	2.616.860.902,00	98,63
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	19.631.009,00	98,16
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.633.262.727,00	2.597.229.893,00	98,63
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	538.500.000,00	482.634.554,00	89,63
Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	340.000.000,00	297.277.203,00	87,43
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	148.500.000,00	136.869.200,00	92,17
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	50.000.000,00	48.488.151,00	96,98
Bidang Statistik	195.000.000,00	177.276.925,00	90,91
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	195.000.000,00	177.276.925,00	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	195.000.000,00	177.276.925,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	195.000.000,00	177.276.925,00	

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	195.000.000,00	177.276.925,00	90,91
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	125.000.000,00	122.540.349,00	98,03
Pengembangan Infrastruktur	70.000.000,00	54.736.576,00	78,20
Bidang Persandian	153.162.000,00	144.286.433,00	94,21
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	153.162.000,00	144.286.433,00	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	153.162.000,00	144.286.433,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	153.162.000,00	144.286.433,00	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	153.162.000,00	144.286.433,00	94,21
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	153.162.000,00	144.286.433,00	94,21

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek Tahun 2023. Penyusunan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek menetapkan sebanyak 2 (dua) tujuan dan 5 (lima) sasaran dengan 12 (dua belas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan dan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Efektif, Efisien, Produktif dan Profesional, dengan indikator kinerja Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah target 86,85. Untuk tahun 2023 nilai Reformasi Birokrasi belum dilakukan karena belum ada pedoman untuk melakukan pengukuran sebagaimana surat KemenPANRB Nomor B/01/RB.06/2023 tentang Perubahan Evaluasi RB Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktek Baik Reformasi Birokrasi, disebutkan bahwa:
 - b. Menghentikan kegiatan pengisian PMPRB;

- c. Mekanisme evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023 akan dilakukan berdasarkan pada peraturan terbaru.
2. Tujuan Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 140% (Efisien)
 3. Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 106% (Efisien)
 4. Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 5 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 141% (Efisien)
 5. Sasaran Meningkatnya Kualitas Sistem Pengembangan Aplikasi Informatika terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 125% (kategori Efisien)
 6. Sasaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Efisien)
 7. Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100x% (kategori Efisien)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 tujuan dan 5 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 12.206.585.997 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 11.802.844.968, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 96,69% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 3,31%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang

telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Trenggalek.

B. Rekomendasi dan Tindaklanjut

Implementasi AKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilaksanakan dengan sesuai dengan kriteria yang berlaku. Akan tetapi masih terdapat beberapa catatan yang dapat disempurnakan lagi demi terlaksanankan implementasi AKIP yang optimal. Inspektorat Kabupaten Trenggalek merekomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika agar:

1. Melakukan analisa atas capaian kinerja tahun sebelumnya untuk menetapkan target capaian kinerja tahun mendatang;
2. Mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian (refocussing) organisasi dan anggaran;
3. Melakukan koordinasi internal supaya setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;
4. Lebih optimal dalam memanfaatkan informasi kinerja sehingga berpengaruh terhadap budaya kinerja organisasi;
5. Menyusun sebuah alat bantu sederhana berbasis teknologi yang dapat memudahkan pengumpulan data kinerja dalam lingkup unit kerja.

Tindaklanjut Dinas Komunikasi dan Informatika dari rekomendasi terhadap implementasi AKIP sebagai berikut:

Matrik Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika

NO.	URAIAN REKOMENDASI	URAIAN TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT REKOMENDASI			KET.	LINK BUKTI
			TS	TB	BT		
1	Melakukan analisa atas capaian kinerja tahun sebelumnya untuk menetapkan target capaian	Telah dilaksanakan tindak lanjut	TS			Bab III pada LKjIP 2022 telah dilakukan analisa capaian kinerja dengan	https://drive.google.com/file/d/1e25Qqdx6jHkIqXgQsrs1j30IZRk-X74o/view?usp=drive_link

	kinerja tahun mendatang;				tahun sebelumnya	
					Evaluasi renja tahun 2022 triwulan IV	https://drive.google.com/file/d/1-rG2Zgr0UX7gM9kcW7OXxJpgpsQQAW2A/view?usp=drive_link
2	Mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian (refocussing) organisasi dan anggaran;	Telah dilaksanakan tindak lanjut	TS		Matrik rencana program dan kegiatan pada perubahan RKPD tahun 2022	https://drive.google.com/file/d/1W3pwxLbskcsSQyVPY4WQqs8qACJbssR/view?usp=drive_link
3	Melakukan koordinasi internal supaya setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;	Telah dilaksanakan tindak lanjut	TS		Surat evaluasi internal	https://drive.google.com/drive/folders/1CtnyITRrhGlyVWNVLkyZ42PAiFUHlxzu?usp=drive_link
4	Lebih optimal dalam memanfaatkan informasi kinerja sehingga berpengaruh terhadap budaya kinerja organisasi		TS		SK Budaya Kerja Dinas Komunikasi dan Informaika	https://drive.google.com/file/d/1yNII74zlpJOjJteH8pR_8GZo0cFm7fQ/view?usp=drive_link
5	Menyusun sebuah alat bantu sederhana berbasis teknologi yang dapat memudahkan pengumpulan data kinerja dalam lingkup unit kerja	Telah dilaksanakan tindak lanjut	TS		Evaluasi kinerja secara berkala	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t0jKvuOqSndMOCTjTMpJn69A4pQc_7Tw/edit?usp=drive_link&ouid=111844895328938536848&rtppof=true&sd=true

C. Saran

Untuk meningkatkan akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika, maka disarankan untuk melakukan perbaikan melalui:

1. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan ketersediaan anggaran;

2. Melakukan kolaborasi antar perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
3. Membangun komitmen semua pimpinan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika agar dalam merencanakan program dan kegiatan selalu mengacu pada dokumen perencanaan yaitu RPJMD ditingkat Kabupaten serta Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Tahun 2021-2026 serta Rencana Kerja Tahunan; dan
4. Bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bukan hanya melaporkan capaian realisasi keuangan, tapi manfaat dari kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga selaku pelaksana kegiatan untuk memberikan data-data yang akurat dan tepat waktu.

DAFTAR GAMBAR/TABEL

Tabel	1.1	Penempatan Unit Kerja	7
Gambar	2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informati	8
Tabel	2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek	14
Tabel	2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek	15
Tabel	2.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika	17
Tabel	2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
Tabel	2.5	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	21
Tabel	3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	25
Tabel	3.2	Capaian Indikator Utama Dinas Komunikasi dan Informatika	29
Tabel	3.3	Indeks SPBE Tahun 2023	32
Tabel	3.4	Perbandingan indeks SPBE Tahun 2022 dan Tahun 2023	44
Tabel	3.5	Perbandingan Pengaduan Tahun 2022 dan 2023	47
Tabel	3.6	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	50
Tabel	3.7	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Kabupaten/Kota lain	55
Tabel	3.8	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	57
Tabel	3.9	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	64
Tabel	3.10	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	67